

Oleh: Masdar Hilmy, PhD., Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sunan Ampel

Keterlibatan kaum muda dalam pusaran ideologi radikalisme dan terorisme keagamaan merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Selalu ada sekelompok anak muda yang secara aktif terlibat dalam setiap peristiwa kekerasan atau terorisme keagamaan, baik di tanah air maupun di belahan dunia lain. Memperhatikan kenyataan itu, diperlukan sebuah kebijakan dan program deradikalisasi yang secara spesifik menempatkan anak muda sebagai target utama, bukan lagi kebijakan biasa yang berlaku umum.

Di Indonesia, sejumlah peristiwa radikalisme dan terorisme selalu melibatkan anak muda. Sekalipun bukan dalam kapasitas sebagai ideolog atau mentor spiritual, para pelaku aktif selalu didominasi anak muda. Lihat saja nama-nama di balik serangkaian peristiwa terorisme seperti bom Bali I dan II, bom Kuningan, bom di depan kedutaan Australia, bom di masjid Polres Cirebon, bom di Gereja Injil Sepenuh Solo, hingga pelaku penembakan polisi beberapa saat lalu. Semua peristiwa tersebut digerakkan dan dilakukan anak-anak muda berusia 17–35 tahun.

Di Eropa, terjadi kecenderungan yang sama, terutama setelah tragedi 11 September 2001. Jika para aktivis gerakan radikal sebelum tragedi WTC didominasi "kaum tua" yang berpengalaman berperang di daerah konflik seperti Afghanistan, para pelaku radikalisme belakangan ini memperlihatkan semakin mudanya usia mereka. Hal itu mengindikasikan bahwa kepegangan ideologi radikalisme dan terorisme keagamaan di Eropa juga cenderung bergerak semakin "muda" (Stepanova, 2007: 150).

Menurut data yang dirilis Europol, di antara 706 aktivis radikal yang ditangkap di Eropa pada 2006, lebih dari 2/3 (lebih dari 470 orang) terdiri atas anak muda berusia 26–41 tahun. Di beberapa negara di benua tersebut, terutama Inggris, terdapat sejumlah pelaku dengan usia yang jauh lebih muda, yakni 17 dan 19 tahun. Hal itu mengindikasikan bahwa ideologi radikalisme memiliki daya pesona yang cukup kuat bagi anak muda, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju.

Keterlibatan kaum muda di balik fenomena ISIS bahkan lebih mencengangkan. Sebagaimana yang dapat kita saksikan melalui media sosial seperti *YouTube*, terdapat anak-anak berusia 10 tahun ke bawah yang menjadi pelaku kekerasan dan bom bunuh diri. Artinya, anak-anak telah menjadi korban radikalisasi ideologi keagamaan oleh para orang tua yang seharusnya menjadi penjaga ideologi bagi anak-anaknya.

Kepegangan kaum muda terhadap ideologi radikalisme merupakan isu yang harus dicermati di tengah bonus demografi yang tengah berlangsung di negeri ini. Di antara total 250 juta penduduk pada 2015, sebanyak 66,5 persen (163 juta jiwa) adalah penduduk usia produktif (15–65 tahun). Jika ledakan usia angkatan kerja produktif tidak dikelola secara baik, bonus demografi dapat menjadi musibah daripada berkah. Pada gilirannya, ledakan penduduk bisa menimbulkan berbagai bentuk patologi sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, ketimpangan sosial, dan semacamnya. Dalam kondisi semacam ini, paham radikalisme keagamaan rawan menjangkiti anak muda.

Pertanyaannya, mengapa anak muda? Bagi para tokoh radikal, anak muda menjadi *potential recruit* yang mudah dibujuk "narasi tipis" ideologi radikalisme. Anak muda adalah segmen usia yang rentan terhadap keterpaparan paham keagamaan radikal. Kebanyakan pakar radikalisme dan terorisme (J.M. Venhaus, 1995: 21) menunjuk pada faktor psikologis-sosial sebagai pemicu keterlibatan anak muda dalam fenomena radikalisme seperti (1) krisis psikologis, (2) identifikasi sosial, (3) pencarian status, dan (4) balas dendam terhadap "musuh".

Dalam rangka mengantisipasi semakin maraknya keterlibatan anak muda dalam pusaran ideologi radikalisme, negara perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, mendesain materi dan metode deradikalisasi yang relevan dengan karakteristik psikologis anak muda. Harus diakui, program deradikalisasi di negeri ini kurang mengakomodasi metode serta materi yang menggugah, inspiratif, dan relevan dengan kebutuhan psikologis-intelektual anak muda. Sebab, target program deradikalisasi selama ini adalah kelompok usia dewasa.

Kedua, perluasan jangkauan program deradikalisasi ke wilayah-wilayah yang selama ini dianggap privat seperti keluarga. Program deradikalisasi oleh BNPT selama ini hanya menyentuh ormas-ormas keagamaan dewasa yang jumlahnya terbatas. Dalam konteks ini, jumlah anak muda yang tidak terlibat dalam program deradikalisasi jauh lebih banyak.

Ketiga, mengatasi dislokasi dan deprivasi sosial anak-anak muda melalui program pelibatan sosial (*social inclusion*). Selama ini, proses kognitif dan psikologis anak muda kurang terawasi dengan baik oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Mereka menjadi radikal karena komunikasi sosial mereka dengan orang-orang terdekat terputus. Solusinya, anak muda harus sesering-seringnya diajak berdialog dan berkomunikasi dengan orang dewasa.

Keempat, penanaman wawasan keagamaan yang terintegrasi dengan wawasan kebangsaan. Harus diakui, wawasan keagamaan anak muda selama ini lebih banyak tercerai-kecikan dari wawasan kebangsaan. Akibatnya, wawasan keagamaan mereka menjadi kering, harfiah, dan antisosial. Dalam kondisi semacam ini, pemahaman keagamaan bisa menimbulkan loyalitas yang terbelah (*split loyalty*) di kalangan anak muda. Loyalitas terhadap nilai-nilai keagamaan berkorelasi negatif terhadap loyalitas kenegaraan dan kebangsaan.

Kelima, perlu penciptaan *role model* yang bisa dijadikan rujukan dan panutan dalam kehidupan keagamaan anak-anak muda. Namun, anak-anak muda kita mengalami krisis keteladanan di kalangan orang dewasa karena kehidupan bangsa ini lebih banyak dijejali figur "pendosa" yang tidak patut dicontoh. Bagi anak muda kita, menemukan figur orang dewasa yang patut dicontoh ibarat menemukan sebuah jarum di tengah onggokan jerami kering. (*)

Artikel ini telah dimuat di Jawa Pos pada Jumat 27/03/2015